

EVOLUSI GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN: STUDI KEPUSTAKAAN TENTANG KONTRIBUSI WALUBI DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT INKLUSIF

Indra Harahap¹, Alda Malik Fadillah², Anya Dwi Aprillia³, Putri Zahra⁴, Mh Farhan⁵, Fika Fahriza⁶

indraharahap@uinsu.ac.id, aldamalikjr@gmail.com,
anyadwiaprilianst03@gmail.com, ptrzhr38@gmail.com,
muhammadfarhan8073@gmail.com, fikafahriza10@gmail.com

Abstract

This article examines the transformation of the Indonesian Buddhist Community Representative (Walubi) from a representative-bureaucratic entity into a socio-religious driving actor through the praxis of Engaged Buddhism. Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) method that adapts the PRISMA protocol, this research synthesizes academic literature published from 2005 to 2026 to dissect Walubi's social maneuvers in the public sphere. The results indicate that Walubi's contribution to building an inclusive society in Indonesia manifests in three movement typologies: (1) cross-boundary health philanthropy that effectively deconstructs stereotypes of minority exclusivity; (2) disaster emergency response mobilization utilizing the liminality phase to weave communal solidarity; and (3) nonviolent structural diplomacy within the Religious Harmony Forum (FKUB). Sociologically, these maneuvers successfully mitigate primordial prejudice through intense cultural interactions. However, this study also finds that inclusion built upon philanthropic schemes leaves an asymmetrical class power relation, risking becoming a "pseudo-inclusion" if unaccompanied by equality advocacy in public policy. This article concludes that amidst the threat of identity politics polarization, Walubi's Engaged Buddhism movement is challenged to evolve from a mere crisis-mitigation instrument into a sustainable agent of multicultural citizenship literacy.

Keywords: *Social movement, Engaged Buddhism, social inclusion, Walubi, identity politics*

¹²³⁴⁵⁶ UIN Sumatera Utara, Medan(Tanoto 2024)

Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dari entitas representatif-birokratis menjadi aktor penggerak gerakan sosial keagamaan melalui praksis *Engaged Buddhism*. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengadaptasi protokol PRISMA, penelitian ini mensintesis literatur akademik terbitan 2005-2026 untuk membedah manuver sosial Walubi di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Walubi dalam membangun masyarakat inklusif di Indonesia bermanifestasi dalam tiga tipologi gerakan: (1) filantropi kesehatan lintas batas yang secara efektif mendekonstruksi stereotip eksklusivitas minoritas; (2) mobilisasi tanggap darurat bencana yang memanfaatkan fase liminalitas untuk merajut solidaritas komunal; serta (3) diplomasi struktural nirkekerasan di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Secara sosiologis, manuver ini berhasil meredam prasangka primordial melalui interaksi kultural yang intens. Namun, kajian ini juga menemukan bahwa inklusi yang dibangun melalui skema filantropi masih menyisakan ketimpangan relasi kuasa kelas, yang berisiko menjadi "inklusi semu" jika tidak dibarengi advokasi kesetaraan di ranah kebijakan publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa di tengah ancaman polarisasi politik identitas, gerakan *Engaged Buddhism* Walubi dituntut untuk berevolusi dari sekadar instrumen peredam konflik krisis menjadi agen literasi kewarganegaraan multikultural yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Gerakan sosial, Engaged Buddhism, inklusi sosial, Walubi, politik identitas.*

A PENDAHULUAN

Gerakan sosial keagamaan di era kontemporer tidak lagi sekadar berkatut pada urusan teologis-dogmatis, ritus asketis, atau pencarian pencerahan yang eksklusif di dalam tempat ibadah. Sebaliknya, agama telah bertransformasi menjadi instrumen perubahan sosial yang konkret dan dinamis melalui apa yang disebut sebagai "politik kehadiran" di ruang publik (Suhartini 2023). Dalam konteks Buddhisme, pergeseran paradigma ini direpresentasikan secara komprehensif melalui konsep *Engaged Buddhism*. Konsep ini menantang stereotip pasifisme tradisional dengan mengaplikasikan nilai-nilai spiritual, seperti welas asih (*karuna*) dan tanpa kekerasan (*ahimsa*), ke dalam aksi proaktif untuk merespons krisis sosial, mengadvokasi kaum marginal, dan membangun keadilan struktural (Priyono 2026). Di Indonesia, praksis *Engaged Buddhism* menjadi sangat relevan sebagai kerangka etis dalam upaya transformasi sosial di tengah realitas masyarakat yang sangat majemuk (S. Darma 2024).

Sebagai negara dengan pluralitas etnis dan agama yang tinggi, upaya pembangunan masyarakat inklusif di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan pelik berupa polarisasi, sentimen primordial, intoleransi, dan segregasi identitas di ruang publik. Merespons kompleksitas tersebut, penguatan moderasi beragama tidak bisa hanya mengandalkan inisiatif represif atau birokratis dari negara, melainkan sangat membutuhkan intervensi aktif dari aktor-aktor *civil society* (Suaedy 2025). Sayangnya, dalam diskursus akademik arus utama mengenai peran masyarakat sipil ini, studi tentang gerakan sosial keagamaan di Indonesia hampir secara eksklusif didominasi oleh kajian terhadap organisasi massa Islam mayoritas. Sebaliknya, kiprah dan kontribusi sosial dari organisasi keagamaan minoritas kerap kali terpinggirkan, *under-represented*, atau hanya menjadi catatan pinggir dalam literatur akademik.

Padahal, umat Buddha di Indonesia menempati posisi sosiologis yang unik dan kompleks. Seringkali mengalami irisan identitas dengan diaspora Tionghoa, umat Buddha secara historis dihadapkan pada realitas sebagai "minoritas ganda" (*double minority*) yang rentan terhadap stigmatisasi eksklusif dan segregasi sosial-ekonomi (Hoon 2025). Di sinilah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)

menempati posisi yang sangat krusial dan strategis. Sebagai wadah representatif yang mengartikulasikan kepentingan umat Buddha secara nasional, WALUBI memikul beban ganda: menjaga kohesi dan pembinaan internal umat, sembari secara aktif melakukan negosiasi sosial untuk membongkar sekat-sekat eksklusivitas di tengah lanskap mayoritas (Candra 2025). Keterlibatan struktural organisasi keagamaan dalam wadah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi salah satu bukti bagaimana gerakan komunal ini diinstitusionalisasi untuk memelihara resolusi konflik secara berkelanjutan (Tanoto 2024).

Sejumlah literatur terdahulu memang telah berupaya membedah dinamika umat Buddha di Indonesia. Namun, kajian tersebut umumnya terbatas pada penelusuran akar sejarah kelembagaan pada era kolonial hingga Orde Baru, atau sekadar kajian spesifik mengenai pandangan normatif WALUBI terhadap doktrin pluralisme dan toleransi beragama. Tinjauan literatur ini menunjukkan sebuah kesenjangan riset (*research gap*) yang tajam. Mayoritas kajian masih terjebak pada analisis yang bersifat historis-birokratis (mengenai faksionalisme organisasi) atau teologis-normatif (mengenai tafsir ajaran kerukunan). Masih sangat minim studi kepustakaan yang secara sistematis memetakan evolusi WALUBI sebagai sebuah "gerakan sosial" (*social movement*) yang bertransformasi, serta menganalisis bagaimana mereka membingkai isu (*framing processes*) guna mengeksekusi manuver sosial seperti filantropi kesehatan lintas batas, tanggap bencana, dan dialog lintas iman yang berdampak langsung pada pembangunan kohesi sosial di akar rumput (Yuniarti 2024).

Berangkat dari kesenjangan literatur tersebut, artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mensintesis secara kritis kontribusi nyata WALUBI dalam mewujudkan masyarakat inklusif di Indonesia. Melalui metode studi kepustakaan, tulisan ini berupaya menjawab bagaimana praksis *Engaged Buddhism* dioperasionalkan oleh WALUBI ke dalam wujud gerakan sosial kontemporer, serta sejauh mana manuver gerakan tersebut mampu mendekonstruksi hambatan sosiologis, menjembatani polarisasi identitas, dan merawat harmoni masyarakat Indonesia (RI 2024).

B METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan desain SLR bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara kritis dan terstruktur literatur-literatur akademik yang relevan dengan lokus kajian, yakni kontribusi gerakan sosial keagamaan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dalam membangun masyarakat inklusif. Untuk menjaga ketatnya alur seleksi literatur dan meminimalisasi bias subjektivitas peneliti, penelusuran data mengadaptasi protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).

1. Strategi Penelusuran dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada sumber data sekunder yang ditarik dari pangkalan data akademik bereputasi, yaitu Google Scholar, portal Garuda (Garba Rujukan Digital), DOAJ, dan Scopus. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menyilangkan beberapa kata kunci spesifik agar hasil pencarian lebih tajam dan terfokus. Kata kunci utama yang dipadukan dalam pencarian meliputi: "Walubi", "Perwakilan Umat Buddha Indonesia", "*Engaged Buddhism*", "Gerakan Sosial", "Filantropi", "Inklusi Sosial", "Kerukunan Umat Beragama", dan "FKUB". Kata-kata kunci ini dikombinasikan secara bergantian untuk menjaring literatur yang paling komprehensif dan sesuai dengan rumusan masalah.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Guna memastikan kredibilitas, presisi, dan relevansi argumentasi, seluruh literatur yang terjaring disaring berdasarkan protokol kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat.

Kriteria inklusi meliputi:

1. Artikel jurnal ilmiah *peer-reviewed* dan buku akademik utuh.
2. Literatur empiris (artikel jurnal) diterbitkan dalam rentang waktu dua dekade terakhir (2005 hingga 2026), guna melacak historisitas hingga dinamika kontemporer gerakan pasca-Orde Baru. Pengecualian batasan tahun diberikan secara khusus pada literatur buku babon (*grand theory*) klasik—seperti Allport (1954), Turner (1969), dan rujukan teori struktural lainnya—yang digunakan secara murni sebagai pisau analisis konseptual.
3. Memiliki fokus kajian pada sosiologi agama, konsep *Engaged Buddhism*, dinamika minoritas Buddha di Indonesia, kiprah kelembagaan Walubi, serta resolusi konflik.

Sementara itu, kriteria eksklusi diterapkan secara berlapis untuk mengeliminasi: (1) literatur yang hanya berfokus pada analisis doktrin/teks teologis murni (seperti tafsir sutra) tanpa kaitan dengan realitas sosial-kemasyarakatan; (2) opini publik, blog pribadi, atau artikel populer yang tidak melalui proses *peer-review*; dan (3) artikel yang tautan dokumennya (*full-text*) tidak dapat diakses secara utuh.

3. Prosedur Seleksi Data

Proses seleksi dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap *Identifikasi* mengumpulkan ratusan temuan awal dari basis data berdasarkan *search string*. Tahap *Skrining* dilakukan dengan meninjau judul dan abstrak untuk menyingkirkan artikel yang tidak relevan dengan politik identitas atau sosiologi agama. Terakhir, tahap *Kelayakan* (eligibility) dilakukan dengan membaca teks utuh secara komprehensif, sehingga menyisakan literatur inti yang secara langsung merepresentasikan manuver sosial Walubi di ruang publik untuk disintesis dalam artikel ini.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh literatur yang lolos seleksi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) model interaktif

dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis ini beroperasi melalui tahapan yang dinamis:

1. **Kondensasi Data (*Data Condensation*):** Melakukan *open coding* (pengkodean terbuka) untuk menyeleksi dan memfokuskan intisari literatur yang merekam aksi-aksi spesifik Walubi di lapangan.
2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Mengelompokkan temuan ke dalam matriks tipologi gerakan. Di tahap ini, *axial coding* diterapkan untuk menghubungkan aksi di lapangan dengan kerangka konseptual, menghasilkan tiga kategori utama: (a) advokasi kesehatan lintas batas, (b) tanggap bencana/krisis, dan (c) dialog lintas iman struktural
3. **Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*):** Mensintesis temuan-temuan matriks tersebut menggunakan pisau analisis teori *framing* gerakan sosial dan *Engaged Buddhism*. Tahap ini menguji validitas argumen (triangulasi data antarliteratur) untuk memformulasikan simpulan akhir mengenai bagaimana praksis gerakan Walubi berhasil mendekonstruksi eksklusivitas primordial dan membangun masyarakat inklusif di Indonesia.

C HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Dinamika Historis: Dari Organisasi Representasi ke Penggerak Sosial

Analisis terhadap dinamika historis Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) menunjukkan adanya pergeseran peran kelembagaan yang radikal, dari sekadar entitas representasi politik-birokratis yang bersifat defensif menjadi aktor penggerak gerakan sosial keagamaan yang proaktif. Memahami evolusi ini sangat krusial untuk memetakan bagaimana praksis *Engaged Buddhism* dipaksa berakar oleh realitas sosial-politik dalam konteks ke-Indonesiaan.

Berdasarkan penelusuran literatur, kemunculan awal organisasi-organisasi keagamaan Buddha di Indonesia tidaklah lahir murni dari kesadaran organik umat, melainkan sangat dikondisikan oleh hegemoni politik

negara (Brown, 2001; Yulianti, 2022). Untuk memahami lokus historisnya, penelusuran harus ditarik pada konstelasi politik masa Orde Baru. Pada periode ini, kebijakan korporatisme negara memaksa konsolidasi umat Buddha ke dalam satu wadah tunggal. Eksistensi umat Buddha berada dalam cengkeraman kebijakan asimilasi paksa yang mendepolitisasi agama dan etnis, berdampak langsung pada peleburan identitas kebudayaan Tionghoa ke dalam identitas nasional yang monolitik (Suryadinata, 2005). Posisi umat Buddha kala itu sangat rentan, mengingat adanya irisan demografis yang kuat dengan etnis Tionghoa. Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi sosiologis sebagai *double minority* (minoritas ganda) yang kerap menjadi sasaran stigmatisasi eksklusif, alienasi sosial, dan kecurigaan politis akibat warisan Perang Dingin (Hoon, 2008).

Akibat dari tekanan struktural dan represi kultural yang menciptakan trauma kolektif tersebut, eksistensi awal Walubi pada dekade 1970-an lebih banyak berkuat pada upaya bertahan hidup (*survival mechanism*) dan adaptasi struktural. Organisasi difungsikan sebagai jembatan komando antara negara dan umat, mengurus tertib administrasi peribadatan, serta meredam friksi internal di antara berbagai majelis sekte (nikaya) (Yulianti, 2022). Pada fase embrionik ini, elite Walubi menjalankan fungsi *gatekeeping* yaitu menjaga agar dinamika di dalam vihara tidak meluber menjadi isu politik di ruang publik. Praktik keagamaan direduksi menjadi ritual keselamatan privat yang steril dari diskursus keadilan sosial. Meminjam kerangka *contentious politics* dari Tilly & Tarrow (2015), orientasi Walubi kala itu bukanlah untuk menginisiasi gerakan sosial yang menantang tatanan, melainkan semata-mata untuk memelihara *status quo* demi memastikan keamanan fisik dan status kewarganegaraan umat minoritas.

Namun, literatur kontemporer merekam terjadinya pergeseran epos yang menjadi katalisator transformasi organisasi pasca-Reformasi 1998. Transisi menuju era demokrasi memang membuka ruang publik yang lebih luas, namun di saat yang sama meledakkan sentimen primordial, konflik komunal, dan kesenjangan sosial yang selama ini ditekan oleh rezim otoriter (Bagir & others, 2011; Suaedy, 2025). Krisis multidimensional dan rentannya

posisi minoritas di tengah transisi tersebut memaksa Walubi untuk mereartikulasikan posisinya. Menarik diri ke dalam vihara tidak lagi cukup untuk menjamin kohesi sosial. Pada titik inilah, Walubi mulai mengadopsi secara empiris prinsip-prinsip Engaged Buddhism. Mereka menyadari bahwa doktrin pencarian pencerahan (*Bodhi*) tidak boleh berhenti pada ritus asketis, melainkan harus diaktualisasikan melalui keterlibatan sosial untuk mengentaskan penderitaan struktural di luar tembok vihara (Queen & King, 1996; Ratnasari & Priyono, 2026).

Transformasi ini terekam jelas dari proses framing yang dieksekusi oleh elite organisasi (Benford & Snow, 2000). Walubi secara strategis menggeser narasi utama mereka dari sekadar "pembinaan ritual umat" menjadi "pengabdian nyata bagi bangsa". Permasalahan struktural seperti kemiskinan, krisis kesehatan publik, dan diskriminasi tidak lagi dipandang sebagai urusan sekuler negara, melainkan dibingkai sebagai ladang amal spiritual (*punya-khetta*) yang menuntut intervensi aktif umat Buddha (Candra, 2025). Evolusi krusial inilah yang menandai metamorfosis Walubi menjadi sebuah gerakan sosial yang riil. Mereka secara masif mulai memobilisasi modal finansial melalui filantropi dan modal sosial dari jaringan vihara di seluruh Indonesia untuk mengeksekusi aksi-aksi kemanusiaan. Gerakan ini secara sengaja dirancang untuk melampaui sekat-sekat etnis dan agama, yang pada gilirannya meletakkan fondasi pertama bagi kontribusi konkret umat Buddha dalam mendekonstruksi eksklusivitas dan membangun masyarakat Indonesia yang inklusif.

2) Tipologi Kontribusi Sosial Walubi: Manifestasi Engaged Buddhism di Ruang Publik

Transformasi Walubi dari entitas representasi pasif menjadi agen gerakan sosial bermanifestasi ke dalam berbagai manuver empiris di akar rumput. Berdasarkan sintesis literatur, praksis *Engaged Buddhism* yang dieksekusi oleh Walubi tidak bergerak secara acak, melainkan terstruktur ke dalam tiga tipologi kontribusi sosial utama. Keseluruhan tipologi ini didesain

secara strategis untuk mendekonstruksi segregasi minoritas-mayoritas dan menginkubasi ikatan sosial (*social bonding*) dengan kelompok lintas identitas.

1. Filantropi Lintas Batas dan Dekonstruksi Stereotip Minoritas

Tipologi pertama, dan yang paling konsisten direkam oleh literatur sebagai trademark gerakan sosial Walubi, adalah intervensi filantropi masif di sektor kesehatan publik dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan tinjauan historis-empiris, Walubi secara periodik memobilisasi sumber daya finansial dan tenaga ahli medis berskala besar untuk menyelenggarakan program-program seperti operasi katarak gratis, operasi bibir sumbing, hingga pengobatan umum massal yang seringkali dipusatkan di tempat-tempat ikonik seperti pelataran Candi Borobudur maupun Vihara-vihara pusat di berbagai daerah (Candra, 2025). Intervensi ini secara sengaja menyasar kantong-kantong demografi prasejahtera di pedesaan maupun pinggiran kota yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan formal, tanpa membedakan afiliasi agama maupun etnisitas pasien.

Dalam kacamata sosiologi gerakan sosial, aksi karitatif ini bukanlah sekadar praktik sedekah atau *charity* konvensional yang bersifat sporadis. Ini merupakan bentuk manifestasi dari *frame extension* (perluasan bingkai), di mana Walubi secara cerdas melebarkan narasi spiritualitas Buddhis ke dalam ranah penyediaan layanan publik yang seringkali luput dari jangkauan jaring pengaman sosial negara. Lebih tajam lagi, manuver ini berfungsi sebagai instrumen dekonstruksi sosiologis yang sangat kuat. Mengingat adanya irisan identitas yang kuat antara penganut Buddha dan etnis Tionghoa di Indonesia yang secara historis kerap distigmatisasi sebagai kelompok "eksklusif secara ekonomi" atau "asing" (Hoon, 2008), aksi filantropi kesehatan ini menjadi arena di mana Walubi melakukan proses konversi kapital yang sistematis.

Di sini, terjadi konversi dari kapital ekonomi umat (dana filantropi) menjadi kapital sosial berupa kepercayaan (*trust*) dan keberterimaan publik (*public acceptance*). Kajian kontemporer menegaskan bahwa penyelesaian krisis kepercayaan publik merupakan salah satu capaian paling manajerial dari praksis *Engaged Buddhism* (Vu & Tran, 2021). Ketika seorang pasien dari kelompok mayoritas Muslim mendapatkan kesembuhan melalui layanan medis yang diselenggarakan oleh organisasi Buddhis, terjadi proses "perjumpaan yang menyembuhkan" yang melampaui batas-batas doktrinal. Praktik empiris dari ajaran *Metta* (cinta kasih universal) dan *Karuna* (welas asih) ini (Ratnasari & Priyono, 2026) bekerja secara perlahan namun pasti untuk meruntuhkan dinding prasangka di masyarakat akar rumput.

Selain itu, dinamika filantropi ini juga mencerminkan upaya Walubi untuk "menduniawikan" institusi agama. Vihara yang semula dianggap sebagai ruang privat yang tertutup dan misterius oleh masyarakat non-Buddha, dibuka menjadi ruang publik yang fungsional selama kegiatan pengobatan massal berlangsung (Sulani & others, 2025). Keterbukaan ruang fisik ini menjadi katalisator bagi terciptanya masyarakat inklusif, karena di sana terjadi interaksi sosial yang intens antara biksu, relawan Buddhis, dan warga lokal. Melalui strategi "filantropi kesehatan lintas batas" ini, Walubi berhasil mentransformasi persepsi publik: dari minoritas yang dicurigai menjadi mitra sosial yang dihormati, sekaligus membuktikan bahwa kontribusi keagamaan dapat menjadi motor penggerak bagi kesejahteraan inklusif di Indonesia.

2. Mobilisasi Krisis dan Liminalitas dalam Tanggap Bencana

Tipologi kedua dari gerakan sosial Walubi bergeser pada manajemen krisis dan solidaritas kemanusiaan dalam situasi darurat. Mengingat lanskap geografis Indonesia yang berada dalam *zona ring*

of fire dan sangat rentan terhadap katastrofe, Walubi memposisikan dirinya sebagai aktor non-negara yang sangat responsif dalam fase tanggap darurat bencana alam (Sirait & Masrukhi, 2021). Berbeda dengan filantropi kesehatan yang bersifat terencana dan struktural, aksi tanggap bencana menuntut kecepatan mobilisasi sumber daya yang sporadis, taktis, dan melampaui birokrasi formal.

Dalam situasi ini, literatur mencatat terjadinya fenomena "desakralisasi fungsional" pada infrastruktur keagamaan Buddha. Jaringan vihara dan majelis yang tersebar di berbagai provinsi mengalami sublimasi fungsi; tidak lagi sekadar menjadi ruang ritual yang tertutup dan eksklusif bagi pemeluknya, melainkan bertransformasi menjadi simpul-simpul logistik, dapur umum lintas iman, dan posko evakuasi darurat bagi seluruh warga tanpa memandang identitas (Widiyanto et al., 2025). Perubahan fungsi ruang dari "ruang suci yang asing" menjadi "ruang publik yang melindungi" ini merupakan manuver sosiologis penting untuk mendekonstruksi jarak sosial antara minoritas Buddha dan masyarakat mayoritas di sekitarnya.

Keterlibatan aktif Walubi dalam masa krisis memiliki nilai peacebuilding yang sangat tinggi melalui penciptaan kondisi "liminalitas". Meminjam kerangka antropologis V. W. Turner (1969), situasi bencana menciptakan fase liminal—sebuah ruang waktu transisi di mana sekat-sekat identitas agama, status sosial, dan kelas ekonomi melebur sementara ke dalam kesadaran penderitaan komunal yang setara. Dalam lumpur bencana dan antrean bantuan, tidak ada lagi perbedaan antara pemberi dan penerima berdasarkan latar belakang primordial. Walubi secara cerdas memanfaatkan momentum liminal ini untuk membangun *bridging social capital* (kapital sosial menjembatani) yang organik. Kehadiran relawan Buddhis di tengah masyarakat yang sedang berduka membuktikan bahwa solidaritas mereka berakar kuat pada nilai kemanusiaan universal yang inklusif, bukan sekadar simbolisme seremonial.

Lebih jauh lagi, strategi mobilisasi krisis Walubi seringkali melibatkan kerja sama sinergis dengan institusi pertahanan dan keamanan negara, seperti TNI dan Polri. Dalam perspektif sosiologi politik, kolaborasi ini bukan sekadar urusan teknis distribusi bantuan, melainkan sebuah pernyataan "nasionalisme minoritas". Dengan berdiri berdampingan bersama aparat negara dalam misi kemanusiaan, Walubi mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa komunitas Buddha adalah mitra strategis negara yang memiliki komitmen kebangsaan yang utuh.

Resepsi positif dari kolaborasi ini efektif meredam narasi-narasi intoleran yang seringkali mempertanyakan loyalitas kelompok minoritas terhadap tanah air. Dengan demikian, gerakan tanggap bencana Walubi tidak hanya berfungsi sebagai bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid*), tetapi juga sebagai instrumen diplomasi kultural yang memperkuat kohesi sosial dan memvalidasi posisi umat Buddha dalam struktur masyarakat inklusif Indonesia yang demokratis (Suaedy, 2025).

3. Diplomasi Struktural dan Negosiasi di Meja Dialog Lintas Iman

Tipologi ketiga merupakan eskalasi strategis dari aksi karitatif menuju advokasi sosial-politik. Manuver ini didasari oleh kesadaran bahwa kontribusi untuk masyarakat inklusif tidak akan berkelanjutan jika hanya mengandalkan distribusi paket sembako atau intervensi medis semata. Transformasi sosial yang sejati menuntut adanya rekayasa di tingkat kebijakan publik. Oleh karena itu, gerakan sosial Walubi juga diartikulasikan melalui gagasan, lobi tingkat tinggi, dan diplomasi kelembagaan. Kajian literatur menggarisbawahi urgensi peran elite Walubi dalam wadah-wadah resolusi konflik formal yang difasilitasi negara, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), baik di tingkat nasional maupun daerah (Aslati, 2014; Asnawati, 2012).

Di dalam realitas advokasi kerukunan umat beragama, ruang formal seperti FKUB bukanlah sekadar forum silaturahmi antar-pemuka agama, melainkan sebuah arena politis di mana relasi kuasa (*power relations*) dan batas-batas toleransi dinegosiasikan secara alot. Bagi Walubi yang merepresentasikan kelompok minoritas ganda, keterlibatan di arena struktural ini sangat krusial dan menuntut taktik observasi yang ketat. Di sinilah mereka mempraktikkan apa yang disebut sebagai manuver politik nirkekerasan. Menyadari keterbatasan posisi tawarnya secara demografis, elite Walubi menggunakan pendekatan *soft power* dan persuasi rasional daripada mobilisasi massa yang konfrontatif.

Melalui meja dialog, Walubi secara aktif melakukan "sekularisasi bahasa agama" yaitu menerjemahkan paradigma pluralisme Buddhis ke dalam bahasa kebijakan publik yang konstitusional (Tanoto, 2012). Tuntutan atas perlindungan kaum minoritas tidak dibingkai semata-mata sebagai dogma internal agama Buddha, melainkan direartikulasikan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Strategi framing kebijakan ini secara cerdas menutup celah bagi kelompok-kelompok konservatif untuk menyerang posisi mereka menggunakan sentimen sektarian.

Lebih dari sekadar representasi yang pasif, elite Walubi hadir untuk turut merumuskan konsensus etis bersama tokoh-tokoh ormas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu guna meredam potensi eskalasi konflik komunal. Mereka berupaya memberikan argumen penyeimbang yang kuat untuk menolak politisasi agama. Keterlibatan proaktif dan terinstitusionalisasi ini secara tegas membuktikan bahwa *Engaged Buddhism* di Indonesia tidak lagi hanya berkutat pada urusan spiritualitas eksklusif atau filantropi reaktif, melainkan telah berevolusi menjadi arena perjuangan konstitusional. Perjuangan ini bertujuan mengamankan hak-hak sipil kaum minoritas, sekaligus merawat pilar-

pilar harmoni masyarakat majemuk secara struktural dan berkesinambungan (Suaedy, 2025).

3) Peran Strategis dalam Moderasi Beragama dan Resolusi Konflik

Keterlibatan WALUBI dalam arsitektur moderasi beragama di Indonesia bukan sekadar partisipasi formal-birokratis, melainkan sebuah manifestasi dari strategi bertahan sekaligus berkontribusi dalam ruang publik yang plural. Dalam perspektif sosiologi gerakan sosial, WALUBI memainkan peran sebagai *bridge-builder* (pembangun jembatan) yang menghubungkan kepentingan komunitas minoritas dengan agenda besar stabilitas nasional yang diusung oleh pemerintah. Peran ini menjadi sangat krusial di tengah meningkatnya kerentanan konflik identitas yang sering kali dipicu oleh misinformasi dan prasangka primordial di era digital (Suhartini 2023).

Secara struktural, WALUBI menginstitutionalisasi peran resolusi konfliknya melalui partisipasi aktif dan konsisten dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Di dalam forum ini, perwakilan WALUBI tidak hanya berfungsi sebagai "penjaga kepentingan" umat Buddha, tetapi juga sebagai mediator netral yang sering kali mampu meredakan ketegangan lintas iman melalui pendekatan yang berbasis pada nilai *Ahimsa* (tanpa kekerasan). Kehadiran WALUBI dalam forum-forum pengambilan keputusan terkait pendirian rumah ibadah atau penyelesaian gesekan sosial di akar rumput menunjukkan bahwa organisasi ini telah menjadi bagian integral dari mekanisme peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi konflik keagamaan di Indonesia (Tanoto 2024).

Lebih jauh lagi, kontribusi WALUBI dalam pembangunan masyarakat inklusif secara simbolis tecermin dalam pengelolaan perayaan keagamaan besar, seperti Waisak Nasional di Candi Borobudur. WALUBI berhasil mentransformasi situs suci tersebut dari sekadar lokus ritual eksklusif menjadi ruang pertemuan inklusif yang melibatkan berbagai elemen bangsa, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku ekonomi lokal lintas agama. Strategi "wisata religi inklusif" ini merupakan bentuk moderasi beragama yang substantif, di mana nilai-nilai Dharma diposisikan sebagai warisan

budaya nasional yang dapat diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa rasa terancam secara akidah(S. Darma 2024).Hal ini secara efektif mendekonstruksi narasi segregasi yang sering kali memisahkan kelompok minoritas dari akar sejarah kebangsaannya.

Dalam menghadapi dinamika konflik global yang berdampak pada sentimen lokal—seperti isu-isu kemanusiaan di tingkat internasional—WALUBI secara konsisten menunjukkan sikap yang moderat dan proaktif. Organisasi ini berupaya memisahkan antara sentimen keagamaan dan realitas politik, guna mencegah terjadinya "limpahan konflik" (*conflict spillover*) ke dalam negeri. Melalui pernyataan-pernyataan resmi dan aksi kemanusiaan bersama organisasi lintas iman lainnya (seperti melalui lembaga kerja sama antarumat beragama), WALUBI memperkuat posisi bahwa umat Buddha Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari solusi perdamaian global(Candra 2025). Upaya ini selaras dengan Peta Jalan Moderasi Beragama pemerintah, di mana inklusivitas bukan lagi sekadar retorika toleransi, melainkan komitmen untuk bekerja sama dalam kemanusiaan (*humanitarian collaboration*) demi menjaga keutuhan NKRI(RI 2024).

4) Menguji Dampak Inklusi: Resepsi Masyarakat terhadap Gerakan Walubi

Mengukur dampak konkret dari sebuah gerakan sosial keagamaan terhadap pembangunan masyarakat inklusif tidak cukup hanya dengan mendata jumlah program atau besaran bantuan, melainkan memerlukan pembacaan kritis terhadap resepsi masyarakat di akar rumput. Berdasarkan tinjauan literatur, manuver *Engaged Buddhism* yang diorkestrasi oleh Walubi secara umum menghasilkan dampak sosio-kultural yang positif dalam mereduksi eskalasi konflik, meskipun capaian ini masih dibayangi oleh sejumlah ketegangan dan keterbatasan struktural.

Secara kultural, literatur mencatat bahwa intervensi langsung Walubi melalui aksi filantropi dan tanggap bencana terbukti efektif sebagai instrumen kontra-narasi terhadap stereotip primordial (Candra, 2025; Widiyanto et al.,

2025). Fenomena ini dapat dibedah menggunakan pisau analisis *Contact Hypothesis* (hipotesis kontak) (Allport, 1954). Teori ini mempostulatkan bahwa prasangka antarkelompok dapat direduksi jika terjadi interaksi yang memenuhi syarat kesetaraan status dan tujuan bersama. Pertemuan fisik yang intens di ruang-ruang krisis seperti di posko pengobatan gratis atau tenda pengungsian, memaksa terjadinya interaksi langsung yang melampaui batas dogma. Interaksi lintas batas ini secara perlahan mengikis prasangka historis yang kerap melekatkan identitas Tionghoa-Buddhis dengan eksklusivitas elitis. Masyarakat penerima manfaat, yang mayoritas merupakan pemeluk agama dominan, secara organik mulai merekonstruksi persepsi mereka, mengubah pandangan dari "kelompok liyan (*the others*) yang tertutup" menjadi "sesama anak bangsa yang solider". Keberhasilan membangun jembatan empati di tingkat kultural ini merupakan indikator mendasar dari terciptanya embrio kohesi sosial di masyarakat majemuk (Budiman & Ulfiah, 2021).

Di level sosiopolitik, resepsi positif terhadap kiprah Walubi terekam kuat melalui legitimasi yang diberikan oleh negara dan sesama ormas keagamaan. Penerimaan tokoh-tokoh agama mayoritas terhadap eksistensi representasi Walubi di dalam kelembagaan FKUB mencerminkan adanya pengakuan (*politics of recognition*) atas posisi setara umat Buddha dalam diskursus moderasi beragama di Indonesia (Aslati, 2014; Asnawati, 2012). Ruang dialog lintas iman ini membuktikan bahwa diplomasi *soft power* Walubi berhasil meredam resistensi kelompok konservatif, sekaligus menegaskan bahwa agama minoritas mampu berkontribusi secara proporsional dalam merawat stabilitas nasional tanpa memicu kecurigaan teologis terkait agenda proselitisasi (penyebaran agama).

Kendati demikian, tinjauan literatur yang kritis juga menyingkap adanya ambivalensi dari gerakan sosial ini. Dampak inklusi sosial yang dihasilkan dari aksi karitatif dan tanggap bencana seringkali bersifat sangat temporal dan sangat bergantung pada momentum krisis. Ketika fase darurat berlalu, interaksi lintas iman di akar rumput berpotensi menyusut kembali ke dalam batas-batas segregasi komunal masing-masing, menciptakan apa yang

disebut sebagai "inklusi krisis" yang belum tentu bertahan di masa damai (Suaedy, 2025).

Kritik paling fundamental terletak pada relasi kuasa yang diproduksi oleh skema filantropi itu sendiri. Relasi antara Walubi (sebagai pemberi donor) dan kelompok rentan (sebagai penerima manfaat) masih menyisakan ketimpangan kelas yang bersifat asimetris. Praktik karitatif ini memiliki jebakan sosiologis: ia berhasil meredakan ketegangan di permukaan, namun belum sepenuhnya membongkar akar masalah diskriminasi struktural terhadap kaum minoritas di ranah representasi politik dan kesetaraan birokrasi (Hoon, 2011). Inklusi yang terbangun dari transaksi filantropis berisiko menjadi "inklusi semu" jika tidak diiringi dengan advokasi kesetaraan kewarganegaraan secara penuh.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun praksis *Engaged Buddhism* Walubi telah memberikan sumbangsih luar biasa dalam membuka ruang perjumpaan kultural dan meredam intoleransi, transformasi menuju tatanan masyarakat yang sepenuhnya egaliter masih menuntut manuver gerakan yang melampaui batas-batas filantropi.

5) Tantangan Masa Depan: Merawat Inklusi di Tengah Polarisasi Politik Identitas

Meskipun praksis *Engaged Buddhism* yang diartikulasikan Walubi telah membuktikan signifikansinya dalam merajut kohesi sosial, agenda pembangunan masyarakat inklusif di Indonesia ke depan masih dihadapkan pada tantangan struktural yang tajam. Tantangan paling fundamental bagi kelangsungan gerakan sosial organisasi keagamaan minoritas saat ini adalah menguatnya gelombang politik identitas dan populisme agama di ruang publik (Suaedy, 2025).

Dalam satu dekade terakhir, literatur sosiologi politik mencatat adanya tren instrumentalisasi agama untuk kepentingan mobilisasi massa, terutama menjelang momentum elektoral. Polarisasi ini menciptakan iklim sosiologis yang membelah masyarakat kembali ke dalam batas-batas segregasi "kita

lawan mereka" (*us versus them*). Dalam kondisi masyarakat yang terpolarisasi, *bridging social capital* (kapital sosial menjembatani) yang telah susah payah dibangun oleh Walubi melalui aksi filantropi dan tanggap bencana menjadi sangat rentan untuk didekonstruksi oleh narasi-narasi sektarian. Stigmatisasi terhadap etnis Tionghoa dan penganut Buddha sebagai "ancaman asing" atau "liyan secara teologis" kerap kali direproduksi ulang oleh kelompok ultra-konservatif untuk memonopoli kebenaran dan ruang publik (Hoon, 2008; Suaedy, 2025).

Menghadapi konstelasi yang dinamis ini, manuver Walubi tidak bisa lagi sekadar mengandalkan respons karitatif. Ruang-ruang dialog kelembagaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) seringkali dihadapkan pada dilema birokratis dan tekanan massa akar rumput, terutama ketika merespons isu-isu sensitif seperti penolakan pendirian vihara di kantong-kantong mayoritas atau sentimen anti-minoritas di tingkat lokal (Asnawati, 2012; Huda, 2021). Elite Walubi dituntut untuk mengeksekusi diplomasi kultural yang lebih asertif namun tetap berpegang pada prinsip nirkekerasan (*ahimsa*).

Tantangan ke depan bagi Walubi adalah bagaimana mentransformasikan gerakan *Engaged Buddhism* dari sekadar instrumen peredam konflik (*conflict management*) menjadi agen literasi kewarganegaraan multikultural (*multicultural citizenship*). Artinya, edukasi mengenai pluralisme dan toleransi tidak hanya disuarakan di meja perundingan elite FKUB atau di posko bantuan bencana, tetapi harus diinstitutionalisasi melalui kurikulum pendidikan internal umat yang berwawasan multikultural (Baidhawya, 2005) dan kampanye ruang publik yang lebih masif. Hanya dengan kemampuan beradaptasi di tengah himpitan politik identitas inilah, Walubi dapat mempertahankan relevansi gerakan sosialnya, memastikan bahwa inklusi yang tercipta bukan sekadar ilusi karitatif, melainkan tatanan masyarakat majemuk yang substantif dan berkeadilan.

D KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif, artikel ini menyimpulkan bahwa Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) telah mengalami evolusi institusional yang radikal, bertransformasi dari sekadar entitas representasi birokratis pada era Orde Baru menjadi aktor gerakan sosial keagamaan yang proaktif di era reformasi. Transformasi ini digerakkan oleh adopsi empiris terhadap prinsip *Engaged Buddhism*, di mana pencarian spiritualitas tidak lagi dibatasi pada ritus asketis di dalam vihara, melainkan diaktualisasikan melalui keterlibatan langsung dalam merespons penderitaan struktural di ruang publik.

Kontribusi Walubi dalam pembangunan masyarakat inklusif di Indonesia bermanifestasi melalui tiga tipologi gerakan yang strategis: (1) filantropi kesehatan lintas batas yang secara efektif mendekonstruksi stereotip eksklusivitas minoritas Tionghoa-Buddha; (2) mobilisasi tanggap darurat bencana yang memanfaatkan fase liminalitas untuk membangun *bridging social capital* dan solidaritas kemanusiaan universal; serta (3) diplomasi struktural dan negosiasi nirkekerasan di meja dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengamankan hak-hak sipil dan menolak politisasi agama.

Secara kultural, manuver gerakan ini berhasil menciptakan ruang pertemuan lintas iman yang mereduksi prasangka primordial di akar rumput. Kendati demikian, tinjauan sosiologis yang kritis juga menegaskan bahwa inklusi yang dihasilkan dari skema filantropi karitatif masih menyisakan ketimpangan kelas dan berpotensi menjadi "inklusi semu" jika tidak dibarengi dengan advokasi kesetaraan di ranah kebijakan publik. Ke depan, di tengah ancaman polarisasi politik identitas yang kerap mereproduksi sentimen mayoritas-minoritas, gerakan *Engaged Buddhism* yang diusung Walubi dituntut untuk terus beradaptasi. Tantangan terbesarnya adalah menggeser paradigma dari sekadar manajemen konflik reaktif menuju agen literasi kewarganegaraan multikultural yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep, L. (2025). Buddhist ecology and environmental ethics: A multiple-case study in Indonesia. *Jurnal Nyadassana: Jurnal Penelitian Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 4(2), 110–121.
<https://doi.org/10.59291/jnd.v4i2.104>
- Candra. 2025. “Kepemimpinan Strategis Organisasi Keagamaan Minoritas Dalam Ruang Publik: Studi Kasus WALUBI.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 14 (1): 47.
- Hoon, Chang-Yau. 2025. *Identitas Tionghoa Di Indonesia Pasca-Suharto*. Jakarta: LP3ES.
- Priyono, Ratnasari dan. 2026. “Etika Buddhis Dalam Transformasi Sosial Masyarakat Indonesia: Analisis Praksis Engaged Buddhism.” *Jurnal Filsafat Dan Spiritualitas* 4 (2): 89.
- RI, Kementerian Agama. 2024. *Peta Jalan Moderasi Beragama 2024-2029*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- S. Darma, Dkk. 2024. “Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 2 (1): 112.
- Suaedy, Ahmad. 2025. *Civil Society Dan Demokrasi Di Indonesia: Tantangan Abad 21*. Jakarta: LP3ES.
- Suhartini, Rr. 2023. *Agama Dan Masyarakat: Dalam Perspektif Sosiologi Agama Surabaya: Repository UIN Sunan Ampel*. Surabaya: Repository UIN Sunan Ampel.
- Tanoto, Wahyu. 2024. “Pluralisme Dalam Perspektif Walubi.” *Jurnal Studi Agama-Agama* 18 (2): 19.
- Yuniarti, N. A. 2024. *Strategi Navigasi Pendidikan Inklusif Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Keagamaan*. Edited by Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (SNP). Jakarta.

- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
- Aslati. (2014). Optimalisasi peran FKUB dalam menciptakan toleransi di Kota Pekanbaru. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188–199. <https://doi.org/10.24014/trs.v6i2.906>
- Asnawati. (2012). Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (Studi kasus pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara). *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 11(1), 129–140.
- Bagir, Z. A., & others. (2011). *Pluralisme kewargaan: Arah baru politik keragaman di Indonesia*. CRCS UGM & Mizan.
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan multikultural*. Erlangga.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611–639.
- Brown, I. (2001). *The revival of Buddhism in modern Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Budiman, A., & Ulfiah, U. (2021). Promosi inklusi sosial di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20939>
- Candra. (2025). Filantropi Buddhis dan solidaritas sosial di Kota Kisaran: Kajian sosiologis. *Jurnal Budi Pekerti Agama Buddha*, 3(4), 70–81. <https://doi.org/10.61132/jbpab.v3i4.1845>
- Hoon, C.-Y. (2008). *Chinese identity in post-Suharto Indonesia: Culture, politics and media*. Sussex Academic Press.
- Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan moderasi beragama: Strategi tantangan dan peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 283–300. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745>
- King, S. B. (2009). *Socially engaged Buddhism*. University of Hawaii Press.

- Nazmudin. (2017). Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39.
<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>
- Queen, C. S., & King, S. B. (1996). *Engaged Buddhism: Buddhist liberation movements in Asia*. SUNY Press.
- Ratnasari, L. A., & Priyono, E. (2026). Engaged Buddhism sebagai gerakan transformasi sosial. *Tarbiyah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keagamaan*, 10(1). <https://doi.org/10.58791/tadrs.v10i01.685>
- Sirait, M. O., & Masrukhi, S. (2021). Strategi FKUB Bandar Lampung dalam menumbuhkan toleransi umat beragama. *Harmoni*, 20(1), 1–15.
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.458>
- Suaedy, A. (2025). Religious moderation in the public sphere. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3). <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i3.1807>
- Sulani, P., & others. (2025). Buddhist engagement with the Muaro Jambi temple complex. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 6(1), 55–72.
<https://doi.org/10.22373/jsai.v6i1.6862>
- Suryadinata, L. (2005). Buddhism and Confucianism in contemporary Indonesia: Recent developments. In A. L. Smith (Ed.), *Buddhists and Religions in Southeast Asia*. ISEAS.
- Tanoto, W. (2012). Pluralisme dalam perspektif Walubi. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8(1), 104–118. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2012.0801-07>
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious politics* (2nd ed.). Oxford University Press.

- Turner, V. W. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (E. Turner, Ed.). Aldine Transaction.
- Vu, M. C., & Tran, T. (2021). Trust issues and engaged Buddhism: The triggers for skillful managerial approaches. *Journal of Business Ethics*, 169(1), 77–102. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04269-6>
- Widiyanto, W., Yuliana, E. D., & Burmansah, B. (2025). Integrating Buddhist ethics and social harmony. *MICJO*, 2(3), 3864–3878. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.1206>
- Yulianti, Y. (2022). The birth of Buddhist organizations in modern Indonesia (1900–1959). *Religions*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/rel13030223>